

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub system dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kecamatan Sariwangi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sariwangi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan 3 tahapan : yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya.

Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Sariwangi Tahun 2023 merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Tasikmalaya dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan PD Kecamatan Sariwangi. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi PD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja PD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun

mendatang akan makin mendekat pada ke tataran *clean government* dan *good governance*.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Sariwangi dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023 dapat tercapai.
2. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2023 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Tasikmalaya guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan Kecamatan Sariwangi Tahun 2023.
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Sariwangi dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.
2. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Kecamatan Sariwangi.

4. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Sariwangi dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sariwangi Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan,
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian renstra,
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sariwangi Tahun 2021-2026, visi Kecamatan Sariwangi adalah **“Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/ Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera.** Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kecamatan Sariwangi yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional”.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sariwangi pada tahun 2023 melaksanakan 2 Urusan yaitu;

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi

Kedua urusan Perangkat Daerah Kecamatan Sariwangi dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan dalam 10 Kegiatan. Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sariwangi TA. 2023. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sariwangi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat

dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 s.d Triwulan II	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12 = (11/5)
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	point	65,00	59	N/A	0	60 (CC)	60 (CC)	N/A	0
7 1 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 1 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	13	13	12	92%	13	11	11	85%
7 1 1 2 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum di kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
7 1 1 2 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	100%	12	6	6	50%
7 1 1 2 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	100%	12	6	6	50%
7 1 1 2 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	100%	12	6	6	50%

7	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	100%	12	6	6	50%
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	100%	12	6	6	50%
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	100%	12	6	6	50%
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	8	100%	8	8	8	100%
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	3	150%	2	3	3	150%
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	Poin	83,05	81,05	81,05	100%	82	82	82	99%
7	1	2	2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	5	4	80%	5	2	2	40%
7	1	2	2	1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	5	5	4	80%	5	2	2	40%
7	1	2	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	1	100%
7	1	2	2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1	100%	1	1	1	100%

7	1	2	2	4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	Urusan	8	8	8	100%	8	4	4	50%
7	1	2	2	4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	8	8	8	100%	8	4	4	50%
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	33,33%	33,33%	33%
7	1	4	2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	3	3	3	100%	3	1	1	33%
7	1	4	2	1	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	3	3	100%	3	1	1	33%
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0%
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0%
7	1	5	2	1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	100	100%	100	0	0	0%
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100%	100%	90%	90%	1%
7	1	6	2	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	100	100	100%	100%	90%	90%	1%
7	1	6	2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	2	2	100%	2	1	1	50%

7	1	6	2	1	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	8	8	8	100%	8	8	8	100%
---	---	---	---	---	----	--	---	---------	---	---	---	------	---	---	---	------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sariwangi merupakan Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Sariwangi, baik yang terkait dengan pelayanan Administrasi Surat Menyurat, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sariwangi menyelenggarakan urusan yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi, dengan capaian indikator sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sariwangi
Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan Kecamatan Sariwangi yaitu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi, dengan capaian indikator sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sariwangi
Pada tahun 2023, Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sariwangi yaitu Administrasi

Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Sariwangi dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut
ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR (IKU/SPM/IKK/S DG's)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI REALISASI			CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2022	TAHU N 2023	TAHU N 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHU N 2023	TAHU N 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	Poin	59(CC)	60(CC)	61(B)	63(B)	59	60	61(B)	63 (B)	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak ada penilaian dari Inspektorat, jadi masih menggunakan target Renstra
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	poin	81,05	82,00	82,05	83,00	81,05	82,16	82,21	83,16	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya diharapkan IKM setiap tahun dapat meningkat sebesar 0,2%
3	Persentase peningkatan status desa	%	NA	14,29 %	14,29 %	14,29%	14,29%	14,29 %	14,29 %	14,29%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak ada kegiatan karena tidak ditunjang oleh anggaran

4	Persentase gangguan trantibum yang di tindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, Perangkat Daerah Kecamatan Sariwangi telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Sariwangi. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai Perangkat Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kecamatan Sariwangi mencakup penunjang urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Tasikmalaya adalah Misi ke 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sariwangi dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut:

❖ Aspek kajian kelembagaan Kecamatan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi *budgeting* alokasi anggaran Kecamatan berasal dari APBD Kabupaten/Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan. Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan kedudukan Kecamatan Sariwangi, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Kecamatan Sariwangi, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Sariwangi tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan Kecamatan yang lainnya.

❖ Aspek kajian dari sumber daya manusia

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi Perangkat Daerah Kecamatan Sariwangi

bisa terwujud. Kemudian faktor yang mempengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kecamatan Sariwangi. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.

❖ **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kecamatan Sariwangi harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah tidak memadai yang perlu untuk pengadaan baru sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat,

❖ **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

Kondisi sosiologis masyarakat Kecamatan Sariwangi yang bernuansa Kabupaten dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran Kecamatan, diharapkan dapat tercover untuk diimplementasikan di wilayah Kecamatan Sariwangi.

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sariwangi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain:

- Posisi Kecamatan Sariwangi yang berada di wilayah Kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan daerah dan pusat perdagangan dan jasa, sehingga sebagai wajah depan Kabupaten Tasikmalaya maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik Kabupaten,
- Kecamatan Sariwangi sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan,
- Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka telah dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten diterapkan, maka diharapkan tidak terjadi ‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Sariwangi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *goodgovernance*.

Kecamatan Sariwangi merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berperan strategis dalam konstalasi pembangunan

daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di Pusat Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Sariwangi akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Tasikmalaya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Sariwangi membutuhkan sinergitas antara semua Perangkat Daerah yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Sariwangi sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk melihat Kecamatan Sariwangi secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya

Nama PD : KECAMATAN SARIWANGI

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					REVISI HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)			
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sariwangi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	Poin	5	1.913.390.758	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sariwangi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	Poin	5	1.913.390.758	
7	01	001	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sariwangi	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%		1.913.390.758	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sariwangi	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%		1.913.390.758	
7	01	001	2.0	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1.913.390.758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1.913.390.758	
7	01	001	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sariwangi	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan	31	65.060.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sariwangi	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan	31	65.060.000	
7	01	001	2.0	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	12	31.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	12	31.000.000	

7	0	00	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	12	14.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	12	14.500.000	
7	0	00	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sariwangi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	25.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sariwangi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	25.200.000	
7	0	00	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sariwangi	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	81.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sariwangi	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	81.400.000	
7	0	00	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sariwangi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	71.197.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sariwangi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	71.197.500	
7	0	00	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	10.202.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	10.202.500	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	Poin	82,05	49.460.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	Poin	82,05	49.460.000	

7	0	00	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	14.370.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	14.370.000	
7	0	00	2.0	00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	14.370.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	14.370.000	
7	0	00	2.0	00	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Sariwangi	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Dokumen	8	0	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Sariwangi	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	8	0	
7	0	00	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	15.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	15.000.000	
7	0	00	2.0	00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Laporan	1	15.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sariwangi	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Laporan	1	15.000.000	

7	0	00	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sariwang	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sariwang	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	
7	0	00	2.0	00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Kecamatan Sariwang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	25.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Kecamatan Sariwang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	25.000.000	
7	0	00			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sariwang	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	27.945.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sariwang	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	27.945.000	
7	0	00	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sariwang	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	27.945.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sariwang	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	27.945.000	
7	0	00	2.0	00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sariwang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	8	12.730.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sariwang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	8	12.730.000	

7	0	00	2.0	01	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamata n Sariwang i	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokum en	1	15.215.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamata n Sariwang i	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokume n	1	15.215.000
---	---	----	-----	----	--	--------------------------------	--	-------------	---	------------	--	--------------------------------	--	-------------	---	------------

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360). Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Adapun Sistematika penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017. Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja berupa program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pada Triwulan II, kedudukan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan Sariwangi. Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintahan Kecamatan Sariwangi merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sariwangi Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan

perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sariwangi.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sariwangi di Tahun 2023 adalah sebanyak : 5 Program, 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah mengalami perubahan sebesar Rp. 1.968.003.006.00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ribu Enam Rupiah*).

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 terdiri atas 5 Program 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, yaitu :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia
- V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Setelah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maka target tujuan dan sasaran pada Kecamatan Sariwangi pada perubahan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Kecamatan Sariwangi

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Sariwangi	0
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	60 (CC)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	82,00
		Persentase Peningkatan Status Desa	14,29 %
		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100 %
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

Tabel 3.2

Sasaran Kecamatan Sariwangi

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	60 (CC)
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	82.00
3.	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase peningkatan Status Desa	14,29 %
4.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Perubahan RKPD						Sumber Dana
			Lokasi	Satuan	Target Capaian		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi		point	60(CC)	60 (CC)	2.099.550.758	1.799.898.006	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan		%	100%	100%	1.913.390.750	1.613.738.006	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	13	13	1.913.390.750	1.613.738.006	Dana Transfer Umum-DAU;Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum di kecamatan		%	100%	100%	65.060.000	65.060.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	12	12	31.000.000	31.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	12	12	6.603.000	6.603.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	12	12	4.800.000	4.800.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12	12	22.657.000	22.657.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100%	100%	39.700.000	39.700.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	14.500.000	14.500.000	Dana Transfer Umum-DAU

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	25.200.000	25.200.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	81.400.000	81.400.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	71.197.500	71.197.500	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	10.202.500	10.202.500	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	Poin	82	82	49.460.000	49.460.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	5	14.370.000	14.370.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	14.370.000	14.370.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	1	15.000.000	15.000.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	Urusan	8	8	20.090.000	20.090.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	8	8	20.090.000	20.090.000	Dana Transfer Umum-DAU

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		%	100%	100%	65.700.000	65.700.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Dokumen			65.700.000	65.700.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Laporan			65.700.000	65.700.000	Dana Transfer Umum-DAU;Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah		%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah		%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Orang			25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan		%	100%	100%	27.945.000	27.945.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan		%	100%	100%	27.945.000	27.945.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Dokumen	8	8	12.730.000	12.730.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Dokumen			15.215.000	15.215.000	Dana Transfer Umum-DAU

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan implementasi dan operasionalisasi dari program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi dalam mencapai tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis PD. Rencana kerja perubahan dibuat berdasarkan visi dan misi organisasi guna mencapai target kinerja program dan kegiatan PD.

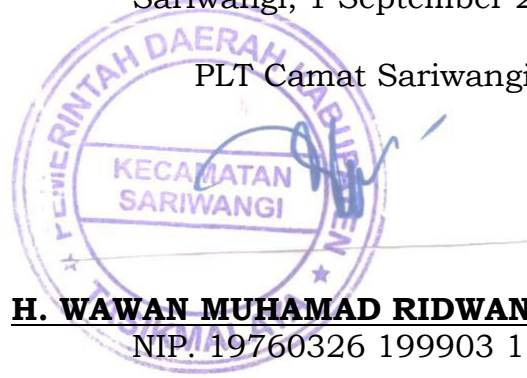
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 juga bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas program kerja Kecamatan Sariwangi selama Tahun Anggaran 2023, serta sebagai alat pengukur pencapaian kinerja organisasi dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Selain itu Renja ini juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam melaksanakan tugas dengan disiplin.

Rencana Kerja Kecamatan Sariwangi Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dan Renstra Kecamatan Sariwangi Tahun 2021-2026. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Output dari Renja Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya adalah program tahunan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan sasaran yang telah ditentukan. Renja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2023, yang telah disesuaikan dengan pagu indikatif. Dengan adanya Renja Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Sariwangi, 1 September 2023

PLT Camat Sariwangi



H. WAWAN MUHAMAD RIDWAN, S.IP, M.Si

NIP. 19760326 199903 1 003